

Budidaya tanaman keras masih belum menjadi prioritas: pembelajaran dari Desa Mangkung

Oleh: Nugraha Firdaus*

“Saya kira bapak-bapak ini tim dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan melakukan survei proyek bedah rumah”. Begitulah ungkapan yang disampaikan salah satu warga desa ketika kami datang untuk melakukan survei pengumpulan data dasar tentang penelitian pengembangan produksi dan strategi pemasaran kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk peningkatan penghidupan petani di Desa Mangkung, tepatnya di Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Pada saat itu, proyek bedah rumah yang merupakan program dari Pemda Kabupaten Lombok Tengah sedang hangat-hangatnya dilakukan. Menyikapi ungkapan tersebut, *enumerator* kami sebagai pelaksana survei harus menyampaikan kepada para responden bahwa kedatangan kami bukan untuk survei proyek bedah rumah, tetapi untuk survei pendahuluan dari penelitian yang akan kami lakukan. Setelah mengerti maksud dan tujuan kami, akhirnya mereka bersedia untuk membuka diri menjawab pertanyaan dari *enumerator*.

Sekilas Desa Mangkung

Desa Mangkung mempunyai topografi landai sampai berbukit dengan luas mencapai 3.134 hektar, dan merupakan desa terluas di Kecamatan Praya Barat^[1].

[1] Anonimous, 2011. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Mangkung Kepada BPD Anggaran Akhir 2011.

Mayoritas lahan merupakan areal pertanian yang terdiri dari sawah tadah hujan, tegalan/ladang, dan kebun. Di Desa Mangkung terdapat kawasan hutan negara yang berada di areal perbukitan sebelah utara dan termasuk dalam kawasan Hutan Blok Mareje Bongak. Saat ini sebagian kawasan hutan tersebut merupakan areal Hutan Tanaman Industri (HTI) kayu energi milik PT. Sadhana Arif Nusa dan Hutan Tanaman Rakyat yang dikelola oleh KSU Tekad Lestari^[2] yang Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)-nya sedang dalam proses pengesahan.

Masyarakat Desa Mangkung umumnya menyandarkan penghidupannya dari sektor agraria seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Hal ini terlihat dari gambaran sumber mata pencaharian penduduk tersebut yang lebih dari 80%-nya adalah petani,

[2] Kepbup Loteng No. 394 Tahun 2010 dengan luasan 72,99 ha.

peternak, buruh tani, dan sisanya bekerja sebagai pegawai, pedagang, maupun wiraswasta. Selain bekerja di sekitar Lombok Tengah, sebagian penduduk Desa Mangkung berkerja di berbagai negara, terutama ke jazirah Arab dan Malaysia sebagai tenaga kerja Indonesia.

Gambaran mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Mangkung tersebut diperoleh dari survei pendahuluan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dasar mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui kegiatan penelitian yang didanai oleh *Australian Center for International Agricultural Research* (ACIAR).

Budidaya tanaman keras di Desa Mangkung

Survei untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap budidaya tanaman keras dilaksanakan di Dusun Mangkung Lauq dan Dusun Orok Gendang. Kedua desa tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan negara. Berdasarkan diskusi di tingkat desa, kedua desa tersebut merupakan wilayah yang mempunyai lahan garapan selain sawah (kebun dan pekarangan) paling luas.

Dalam survei ini, tim telah mendatangi 58 responden dari dua dusun tersebut. Responden dipilih berdasarkan informasi dari kepala dusun dengan mempertimbangkan luasan kepemilikan lahan. Semua responden yang dipilih adalah warga dusun yang mempunyai lahan garapan baik berupa sawah, kebun, maupun pekarangan dengan luas berkisar antara 0,2 - 2 hektar.

Tanaman padi, palawija (jagung, kedelai) dan tembakau merupakan komoditi yang dibudidayakan di sawah secara bergilir, sedangkan tanaman



Penggunaan lahan kebun di Dusun Mangkung Lauq (Foto: Nugraha Firdaus)

keras dan buah-buahan ditanam di kebun dan pekarangan. Hanya sebagian kecil dari responden yang memiliki hewan ternak berupa unggas (ayam/itik), kambing, maupun sapi.

Mahoni dan jati merupakan jenis tanaman keras yang dominan ditanam di kebun dan pekarangan, sedangkan pohon penghasil hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang ditanam adalah jenis buah-buahan seperti mangga, kedondong, dan kelapa. Selain itu, sebagian masyarakat khususnya di Dusun Orok Gendang menanam bambu di lahan miliknya.

Hampir semua responden mengungkapkan bahwa tanaman mereka tidak dirawat dan umumnya ditanam dalam jarak tanam yang tidak teratur. Bibit tanaman keras yang digunakan sebagai sumber bahan tanaman umumnya berasal dari cabutan anakan alami. Mereka tidak mengenal kegiatan pemeliharaan tegakan seperti pemangkasan, penjarangan, maupun pemupukan. Hanya tanaman buah-buahan yang ditanam dengan menggunakan bibit yang mereka beli. Budidaya tanaman keras (kayu) dan HHBK di kebun dan pekarangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Berbeda dengan komoditi yang ditanam di sawah, seperti padi, palawija dan tembakau, mereka sudah mempertimbangkan aspek komersialnya. Untuk komoditi tembakau dan padi misalnya, masyarakat melakukan pemanenan setahun sekali dan langsung dijual kepada pengepul atau pedagang perantara. Hal ini menjadi penyebab praktek pertanian di lahan sawah baik untuk padi, tembakau ataupun palawija menjadi prioritas usaha bagi petani di Desa Mangkung, dan mereka mencurahkan sumberdaya tenaga kerja dan biaya untuk kegiatan pertanian sawah.

Minimnya dukungan terhadap komoditi tanaman keras dan HHBK lainnya juga ditunjukkan dengan tidak adanya dukungan penyuluhan dan transfer informasi mengenai kebijakan penanamannya. Masyarakat melaporkan bahwa mereka nyaris tidak pernah mendapatkan penyuluhan mengenai kehutanan, baik dari penyuluh maupun dari pegawai Dinas Kehutanan. Masyarakat juga tidak mengetahui adanya kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah yang secara langsung mereka dapatkan dari jalur resmi.



Penggunaan lahan kebun di Dusun Mangkung Lauq (Foto: Nugraha Firdaus)

Hanya beberapa dari mereka yang berkonsultasi secara tidak resmi kepada kepala dusun maupun aparat desa.

Tantangan dalam pengembangan tanaman keras dan HHBK

Tantangan utama dalam pengembangan tanaman keras dan HHBK adalah meyakinkan masyarakat agar mau terlibat dalam kegiatan penelitian, karena hasilnya akan menjadi masukan bagi masyarakat itu sendiri.

Beberapa dari warga mengungkapkan kekecewaan terhadap program-program yang dilakukan oleh pemegang konsesi Izin Usaha Produksi Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) yang menurut mereka tidak jelas, dan menanyakan hubungan dari kegiatan penelitian ini dengan konsesi tersebut. Mereka juga mengungkapkan harapan bahwa kegiatan penelitian ini bisa membawa manfaat bagi mereka, khususnya dalam memberikan transfer pengetahuan mengenai pengelolaan lahan yang mampu memberikan nilai tambah bagi mereka.

Tantangan lainnya adalah dalam memformulasikan kegiatan penelitian, sehubungan dengan informasi yang diperoleh dari masyarakat yang

mengungkapkan bahwa bimbingan baik dalam bentuk teknis maupun kebijakan sangat jarang, bahkan tidak pernah mereka terima. Secara informal mereka juga mengungkapkan keinginannya untuk kembali menghidupkan beberapa HHBK yang dulu pernah berkembang di dua dusun tersebut, contohnya kegiatan perlebahan.

Penutup

Hasil dari survei pendahuluan dalam penelitian ini memberikan gambaran awal dari kondisi sosial-ekonomi serta praktek pengelolaan lahan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Mangkung. Pembicaraan-pembicaraan informal juga telah mengungkapkan harapan-harapan masyarakat terkait dengan rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan di desa tersebut. Kondisi dan realitas sosial dari hasil survei pendahuluan ini menjadi pembelajaran awal dan sebagai landasan dalam perencanaan kegiatan penelitian ke depan.

* Kepala Seksi Program Evaluasi dan Kerjasama
Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu (BPTHHBK), Mataram, NTB